#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Indonesia berpotensi menjadi negara maju dengan kelimpahan sumber daya alam dan manusianya. Peran penting pemerintah dalam pembangunan Indonesia dengan membuka kesempatan bagi semua pihak untuk pengembangan potensi diri. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata serta stabilisasi perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Tujuan pembangunan nasional tersebut dapat tercapai dibiayai melalui sektor perpajakan.

Pembiayaan pengeluaran dan belanja negara terutama untuk penyediaan fasilitas dan layanan publik menjadi hal yang prioritas bagi pemerintah yang harus didanai dari pajak. Penerimaan pajak juga memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur, meningkatkan, dan menyejahterakan masyarakat luas melalui penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan.

Seluruh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan penerimaan pajak untuk negara dengan kemampuan masing – masing. Dhestiani dan Fatma (2021:175) menjelaskan *self-assessment* digunakan di Indonesia sebagai sistem yang memberi wewenang langsung wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Sistem ini dapat mengurangi kontak langsung antara wajib pajak serta otoritas selaku fiskus sehingga menghindari suap dan tercipta efisiensi dalam prosesnya.

PPh 21 setiap wajib pajak dikenakan pada penghasilan yang diterima sebagai imbalan jasa/pekerjaan yang dilakukan. Mardiasmo (209:21) menjelaskan subjek pajak PPh 21 berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan subjek pajak dalam negeri.

Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berisi enam ruang lingkup terdiri dari sembilan bab khususnya perubahan keempat UU No. 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan PPh 21 yang disahkan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan optimalisasi penerimaan negara untuk pembangunan nasional.

Penelitian Bawamenewi, dkk (2023) di Kantor Kecamatan Bekasi Barat perhitungan dan pelaporan PPh 21 belum sesuai dengan UU HPP sehingga perlu melakukan penyesuaian perhitungan ulang, sedangkan Ningrum, dkk (2020) perhitungan PPh 21 di Dinas PUPR Maluku Utara telah sesuai dengan UU yang berlaku.

Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai lembaga pemerintah memiliki unsur di bidang pariwisata dan kebudayaan. Sektor pariwisata dalam perekonomian lokal dan nasional, berkontribusi terhadap pendapatan pajak dari karyawannya terutama PPh 21. Peran strategisnya dalam mengembangkan pariwisata suatu daerah seringkali bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menggerakkan sektor pariwisata dalam menjalankan fungsinya, perhitungan dan pemungutan PPh 21 menjadi hal yang krusial di Dinas Pariwisata Kota Batu. Jumlah pegawai kurang lebih sebanyak 60 orang

yang menerima penghasilan secara rutin sehingga memerlukan perhitungan PPh 21 yang sesuai dengan UU HPP.

Penjelasan tersebut mendorong peneliti menetapkan judul skripsi "Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Pariwisata Kota Batu" yang relevan dan bermanfaat untuk meningkatkan pengelolaan pajak dan efektivitas sektor pariwisata.

#### B. Rumusan Masalah

Bagaimana mengevaluasi penerapan perhitungan PPh 21 pada Dinas Pariwisata Kota Batu?

# C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan perhitungan PPh 21 pada Dinas Pariwisata Kota Batu.

### D. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan serta mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan terutama perhitungan PPh 21.

## 2. Bagi Dinas Pariwisata

Hasil penelitian dapat memberi manfaat dan informasi dalam perhitungan PPh 21 dengan lebih teliti, efektif, dan efisien.

## 3. Bagi Universitas

Hasil penelitian dapat menambah referensi literasi di perpustakaan dan dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk perkembangan ilmu di Universitas Katolik Widya Karya Malang.